PERSEPSI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN TERHADAP KEBIJAKAN LABELISASI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KELURAHAN PARDOMUAN KOTA PEMATANGSIANTAR

TUGAS AKHIR

Oleh :

AZURA HUSNA
2203110312

Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : Azura Husna

NPM : 2203110312

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada Hari, tanggal: Jum'at, 28 Agustus 2026

Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Yan Hendra, M.Si. (.....)

PENGUJI II : Dr. Faizal Hamzah Lubis, M.I.Kom. (.....)

PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S. Sos., M. SP. (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S. Sos., M. SP.	Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S. Sos., M.I.Kom.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas akhir ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh :

Nama : Azura Husna

NPM : 2203110312

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Tugas Akhir : Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Terhadap Kebijakan Labelisasi Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar

Medan, 07 Agustus 2026

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S. Sos., M.SP.

NIDN : 0030017402

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi

Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom.

NIDN : 0127048401

Dekan

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S. Sos., M.SP.

NIDN : 0030017402

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Azura Husna**, NPM 2203110312 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

   Bila dikemudian hari terbukti penyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

   1. Tugas Akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan
   2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijasah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 08 September 2026

Yang menyatakan



Azura Husna

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Terhadap Kebijakan Labelisasi Keluarga Tidak Mampu Di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar".

Shalawat serta salam senantiasa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban

Kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Boiman dan bidadari surgaku, Ibunda Yusnita yang telah membesarkan, merawat, menyayangi, membersamai dalam tiap proses serta memberikan pengorbanan yang besar baik moral maupun materil. Selain dari dukungan ada doa yang mengalir dari setiap nafas ayah dan ibu sehingga tugas akhir ini dapat penulis terselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mengalami hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu dengan setulus hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.PD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Faizal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti bagi Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama Penulis menempuh pendidikan.

9. Seluruh pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dan Pihak Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar yang telah memberikan izin, kesempatan, serta bantuan informasi kepada Penulis selama pelaksanaan penelitian.
10. Masyarakat Kelurahan Pardomuan terlebih kepada para informan penelitian yang telah meluangkan waktu, informasi, pemikiran dan gagasan untuk kebutuhan data dalam penelitian.
11. Kepada kakak tersayang, Anggi Rafika Ulfa, terima kasih telah hadir dalam tiap proses penulis. Menguatkan penulis di saat lemah, menopang di saat goyah, dan menuntun di saat hilang arah. Di balik setiap air mata dan keraguan penulis, selalu ada tangannya yang menggenggam erat dan meyakinkan bahwa semua ini akan sampai pada akhirnya.
12. Kepada para sahabatku, Nia Ramadhani Naibaho, Rahma Tamba, Miftahul Sakinah Pardede. Terima kasih telah hadir dan mengisi lembaran buku kosong dalam kehidupan penulis. Kehadiran dalam kondisi suka maupun duka menjadikan salah satu alasan penulis untuk tetap melangkah ke arah yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 22 Agustus 2026

Penulis

Azura Husna

NPM: 2203110312

PERSEPSI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN TERHADAP KEBIJAKAN LABELISASI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KELURAHAN PARDOMUAN KOTA PEMATANGSIANTAR

AZURA HUSNA
2203110312

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat penerima bantuan terhadap kebijakan labelisasi Keluarga Tidak Mampu pada rumah penerima bantuan sosial di Kelurahan Pardomuan, Kota Pematangsiantar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat penerima bantuan sosial yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai kebijakan labelisasi, meskipun sebagian besar hanya memahami kewajiban pemasangan label dan belum sepenuhnya memahami tujuan kebijakan tersebut. Tanggapan masyarakat terhadap labelisasi beragam. Sebagian menerima kebijakan tersebut karena bantuan sosial yang diperoleh bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan sebagian lainnya menilai penggunaan istilah "Keluarga Tidak Mampu" berpotensi menimbulkan stigma. Sikap masyarakat cenderung menerima labelisasi meskipun harus menghadapi cibiran dan kecemburuan sosial. Labelisasi dinilai bermanfaat dalam meningkatkan transparansi dan mempermudah identifikasi penerima bantuan sosial. Namun, ketepatan sasaran penyaluran bantuan masih belum optimal karena masih ditemukan penerima yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi, sementara transparansi data belum didukung oleh verifikasi dan pembaruan data secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan pesan komunikasi yang lebih humanis, peningkatan sosialisasi kebijakan, serta verifikasi data penerima secara berkelanjutan agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif, tepat sasaran, dan meminimalkan stigma sosial.

Kata kunci: **Persepsi Masyarakat, Labelisasi, Bantuan Sosial, Stigma Sosial, Transparansi.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
ABSTRAK ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
BAB II URAIAN TEORITIS **10**
2.1 Teori Persepsi 10
a. Faktor Internal (pelaku persepsi) 10
b. Faktor Eksternal 10
c. Faktor Situasi 10
2.2 Teori Labelisasi (Labeling Theory) 11
2.3 Teori Stigma Sosial 12
2.4 Teori Interaksi Simbolik 12
2.5 Konsep Penerima Bantuan Sosial 12
2.6 Anggapan Dasar 13
BAB III METODE PENELITIAN **15**
3.1 Jenis Penelitian 15
3.2 Kerangka Konsep 16
3.3 Defenisi Konsep 16
a. Persepsi Masyarakat 16
b. Masyarakat Penerima Bantuan 17
c. Labelisasi 17
3.4 Kategorisasi Penelitian 17
3.5 Informan 19
3.6 Teknik Pengumpulan Data 20
a. Wawancara 20
b. Observasi 21
c. Dokumentasi 21
3.7 Teknik Analisis Data 21

a. Reduksi Data 21
b. Penyajian Data 21
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian 22
a. Waktu Penelitian 22
b. Lokasi Penelitian 22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 25
4.1 Hasil Penelitian 25
4.1.1 Tabel Informan Penelitian 27
4.1.2. Deskripsi Informan 28
4.1.3 Pengetahuan Masyarakat 30
4.1.4 Tanggapan masyarakat 33
4.1.5 Sikap Masyarakat 37
4.1.6 Manfaat Labelisasi 40
4.1.7 Ketepatan Sasaran 44
4.1.8 Transparansi Data Penerima 47
4.2 Pembahasan 50
BAB V PENUTUP 58
5.1 Simpulan 58
5.2 Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Label Tahun 2019 dan Label 2022 4

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 15

Gambar 3.2 Peta Kelurahan Pardomuan 22

Gambar 4.1 Klasifikasi Desil Masyarakat Pardomuan 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Demografi Kelurahan Pardomuan 23

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian 17

Tabel 4.1 Identitas Informan Penelitian 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan berpenduduk terpadat di dunia setelah India, Tiongkok dan Amerika Serikat (Hidayatullah, 2022). Besarnya kepadatan penduduk menjadi sebuah tantangan dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lapangan pekerjaan, ilmu dan pendidikan, fasilitas kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terus meningkat (Rahmat, 2025). Kebutuhan yang tidak terpenuhi secara merata itulah yang akan memunculkan bobot ekonomi masyarakat yang tidak setara, meningkatkan kesenjangan sosial dan akan menambah populasi keluarga miskin di Indonesia.

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia di tahun 2024 menurun menjadi 8,57%. Namun masih terdapat kesenjangan kemiskinan yang cukup tajam antarprovinsi di Indonesia. Rata-rata tingkat kemiskinan provinsi tercatat sebesar 9,17%, dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,80% di Provinsi Bali dan tertinggi mencapai 21,09% di Provinsi Papua Barat. Nilai simpangan baku sebesar 4,48 persen mengindikasikan bahwa penyebaran tingkat kemiskinan antarwilayah masih relatif tinggi. Secara statistik, meskipun sebagian besar provinsi berada pada kategori kemiskinan menengah ke bawah, sekelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi tetap memberikan kontribusi signifikan

terhadap tingginya rata-rata nasional. Temuan ini menegaskan bahwa penurunan kemiskinan nasional belum sepenuhnya diiringi oleh pengurangan ketimpangan kesejahteraan regional (Sumarwadji et al., 2026).

Meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan membaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kemiskinan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. *Vicious circle of poverty* (lingkaran setan kemiskinan) yaitu faktor penyebab kemiskinan karena adanya siklus kebiasaan yang sulit dihentikan dan berulang-ulang dan membudaya di tiap individunya. Terbentuknya lingkaran setan kemiskinan ini dikarenakan ketertinggalan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia, ekonomi lemah dan ketidaksempurnaan pasar yang mengakibatkan produkivitas menjadi rendah, sedikitnya pendapatan, hingga tabungan dan investasi melemah (Sagita et al., 2025).

Kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” pada sila kelima Pancasila menjadi dasar utama kebijakan sosial dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia yang menuntut kebijakan pemerintah untuk memberikan pemerataan kesejahteraan, layanan sosial, fasilitas umum, pendampingan sosial, dan perlindungan yang memberikan rasa aman dan nyaman menjadi Warga Negara Indonesia. Bantuan sosial hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial (Tamba et al., 2024).

Berdasarkan penelitian (Huda et al., 2024), kebijakan fiskal telah memberikan dampak positif melalui berbagai program kesejahteraan sosial. Hanya saja terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, koordinasi penyaluran yang kurang maksimal, dan ketimpangan distribusi dana. Diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, kerjasama yang baik antar Lembaga agar pembangunan sosial lebih merata, inklusif dan berkelanjutan.

Program bantuan sosial pertama kali dinamai dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu inisiatif pemerintah dalam mengurangi populasi masyarakat miskin pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2005 (Murajid et al., 2022). Program ini awalnya bertujuan sebagai bentuk subsidi pemerintah dampak dari naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk kompensasi agar daya beli masyarakat masih tetap terjaga. Program ini menjangkau hingga 15,5 juta keluarga dengan bantuan sebesar Rp. 100.000 per bulan namun dirapel per 3 bulan melalui PT. Pos Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Pemerataan Pembangunan Ekonomi adalah prioritas utama dalam kepemimpinannya. Memiliki asas demokrasi yang didasarkan pada pasar yang adil (*equity dan equality*). Pada tahun 2015, Program Dana Desa mulai dijalankan untuk mendorong pembangunan yang berfokus dari wilayah perdesaan. Selanjutnya, pemerintah terus menghadirkan berbagai program guna mendukung pemerataan ekonomi, antara lain Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada tiga pilar utama lahan, kesempatan, dan sumber daya manusia serta penetapan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs), Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dan berbagai kebijakan lainnya (Ramdani, 2024).

Sebagai bentuk upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah menyelenggarakan berbagai program bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu. Program-program tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan primer serta meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, penerima bantuan sering kali memperoleh label sosial sebagai “keluarga tidak mampu” atau “keluarga miskin”. Labelisasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif dalam pendataan bantuan sosial, tetapi juga dapat memunculkan berbagai persepsi dan penilaian dari lingkungan sosial.

Gambar 1.1 Gambar Label Tahun 2019 dan Label 2022



Sumber: Hasil Penelitian 2026

Sejak tahun 2019, rumah penerima BANSOS diidentifikasi melalui label yang bertuliskan Penerima Manfaat dan diaplikasikan dalam bentuk stiker. Namun, efektivitas media stiker tersebut dinilai kurang optimal akibat karakternya yang mudah rusak, gampang dilepas secara mandiri, hingga berpotensi memicu

manipulasi status penerima di lapangan. Menanggapi kelemahan teknis tersebut, pada tahun 2024 pemerintah memperketat mekanisme pengawasan dengan mengganti media penanda menjadi stempel cat merah yang sifatnya lebih permanen, disertai pembaruan pesan komunikasi menjadi kalimat Keluarga Tidak Mampu Penerima Bansos.

Penerapan kebijakan labelisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, keberadaan label pada tempat tinggal penerima bantuan diharapkan dapat mempermudah petugas terkait dalam melakukan proses verifikasi, pemantauan, serta evaluasi kondisi sosial ekonomi penerima bantuan secara langsung, sehingga pelaksanaan program bantuan sosial dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah sebagai alat penanda visual bagi rumah tangga miskin yang telah terverifikasi dalam data Dinas Sosial.

Fungsi labelisasi bukan hanya sebagai indikator administratif, tetapi juga sebagai instrumen transparansi publik serta penunjang efektivitas penyaluran bantuan sosial (Fadiah, 2025).

Dalam perspektif ilmu komunikasi, labelisasi merupakan bentuk pemberian makna melalui simbol atau sebutan tertentu yang dapat memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri maupun bagaimana ia dipandang oleh masyarakat. Label “keluarga tidak mampu penerima bantuan” berpotensi menimbulkan stigma sosial, rasa malu, rendah diri, bahkan perubahan pola interaksi sosial bagi penerima bantuan. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang

memandang label tersebut sebagai sesuatu yang wajar karena berkaitan dengan hak mereka sebagai penerima program kesejahteraan sosial.

Persepsi merupakan proses subjektif dalam menginterpretasikan informasi sosial dan pemberian makna yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang menentukan sudut pandang pemikiran. Persepsi melibatkan pengalaman pribadi, keadaan lingkungan sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda tiap orangnya. William James menyatakan bahwa sebagian besar persepsi berasal dari data lingkungan yang diserap oleh indra manusia dan pengolahan ingatan (memori) yang digabungkan berdasarkan pengalaman yang ada dalam memori sebelumnya. (Al-Azan et al., 2025)

Dalam penelitian ini, persepsi masyarakat merujuk pada cara masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Pardomuan memahami, menilai, dan memberi tanggapan mengenai penerapan labelisasi keluarga tidak mampu penerima bantuan yang ditempelkan pada rumah penerima bantuan sosial. Persepsi tersebut mencakup pandangan, perasaan, serta penilaian masyarakat terhadap makna dan tujuan labelisasi, baik sebagai bentuk identifikasi penerima bantuan maupun sebagai kebijakan pemerintah dalam memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Selain itu, persepsi masyarakat juga mencerminkan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi aspek psikologis, sosial, dan interaksi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Pardomuan, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sebagai buruh harian lepas (BHL). Meskipun sektor-

sektor tersebut berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, tingkat kesejahteraan sebagian warga masih tergolong rendah. Kondisi ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat Pardomuan yang berada di bawah garis kemiskinan akibat pendapatan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Salah satu faktor penyebab dari kondisi tersebut adalah masih ditemukannya pekerja yang menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan. Berdasarkan data resmi dari Dinas Tenaga Kerja, UMR yang berlaku sebesar Rp3.228.971 per bulan. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh pekerja memperoleh pendapatan sesuai standar tersebut, sehingga berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan dan meningkatnya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Perbedaan pengalaman dan penilaian terhadap labelisasi tersebut menjadikan persepsi masyarakat penerima bantuan sebagai hal yang penting untuk dikaji. Persepsi yang terbentuk akan memengaruhi sikap, perilaku, serta hubungan sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana masyarakat penerima bantuan memaknai labelisasi “keluarga tidak mampu penerima bantuan”, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan terhadap Labelisasi Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Pardomuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat penerima bantuan

memandang label yang melekat pada dirinya serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang lebih memperhatikan aspek psikologis dan sosial penerima bantuan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana persepsi masyarakat penerima bantuan dalam kebijakan labelisasi Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat penerima bantuan dalam kebijakan labelisasi “Keluarga Tidak mampu” di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu persepsi masyarakat, stigma sosial, teori labelisasi, dan program bantuan sosial pemerintah dalam perspektif komunikasi sosial.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam memahami dampak kebijakan labelisasi “keluarga tidak mampu” bagi keluarga penerima bantuan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi dampak-dampak

yang muncul akibat dari adanya kebijakan labelisasi sehingga mendapatkan upaya untuk mengurangi perasaan diskriminatif dan stigma negatif yang muncul.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi setiap bab yang terdapat dalam tugas akhir.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini peneliti menjelaskan dan menguraikan tentang teori persepsi, teori labelisasi, teori stigma sosial, teori interaksi simbolik, konsep penerima bantuan sosial.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini peneliti menguraikan tentang persiapan penelitian mengenai Jenis Penelitian, kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti memaparkan hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini peneliti memaparkan penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Persepsi

Persepsi merupakan suatu penafsiran pesan yang disimpulkan berdasarkan pengalaman mengenai objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diproleh atas peristiwa yang pernah dilalui. Kegiatan ini memberikan makna kepada stimulus sensorik yang kemudian dapat menafsirkan informasi (Sianturi & Junaidi, 2021).

Persepsi merupakan proses individu dalam menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pancaindra sehingga menghasilkan pemahaman tertentu terhadap suatu objek, peristiwa, atau kondisi sosial.

Berdasarkan teori Robbins dan Judge (dalam Wijaya 2017:48) (Farida et al., 2024) bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

a. **Faktor Internal (pelaku persepsi)**

   Cara pandang dalam menginterpretasikan suatu fenomena dipengaruhi oleh karakteristik individu.

b. **Faktor Eksternal**

   Dipengaruhi oleh sasaran dari persepsi lain seperti barang, benda atau peristiwa.

c. **Faktor Situasi**

   Yaitu faktor dimana situasi yang dapat mempengaruhi proses pembentukan persepsi seseorang.

Dalam perspektif psikologi komunikasi, proses komunikasi diawali dengan tahap sensasi, yaitu proses penerimaan stimulus melalui alat indera yang kemudian diolah menjadi informasi yang bermakna. Menurut Jalaluddin Rahmat, sensasi merupakan dasar terbentuknya persepsi, karena setiap informasi yang diterima individu melalui penglihatan, pendengaran, maupun indera lainnya akan diproses lebih lanjut dalam sistem kognitif (Basit & Pendahuluan, 2018).

2.2 Teori Labelisasi (Labeling Theory)

Teori labelisasi menjelaskan bahwa masyarakat sering memberikan cap atau label tertentu kepada individu maupun kelompok berdasarkan karakteristik yang dianggap menonjol. Teori ini banyak dikembangkan oleh Howard S Backer yang menyatakan bahwa perilaku atau status seseorang sering kali dinilai berdasarkan label yang diberikan oleh lingkungan sosial. Dalam konteks kontrol sosial, teori ini sangat krusial karena mengungkapkan dampak dari memberikan label negatif terhadap pelanggar hukum dan bagaimana perlakuan sistemik bisa memperburuk keadaan (Faried et al., 2025).

Labelisasi dalam ilmu komunikasi berkaitan dengan analisis semiotika. Analisis semiotika pada umumnya dipahami sebagai kajian mengenai tanda-tanda. Pada hakikatnya, semiotika merupakan studi tentang berbagai sistem kode yang memungkinkan manusia menafsirkan suatu objek atau fenomena sebagai tanda yang memiliki makna tertentu (Lubis, 2018).

Dalam bahasa Indonesia, semiotika dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tanda-tanda. Teori semiotika yang dikemukakan oleh Charles

Sanders Peirce dikenal sebagai teori segitiga makna (*Triangle of Meaning*), yang mencakup tiga unsur utama, yaitu tanda (*Sign*), Objek *(Object),* dan penafsiran (*Interpretant*). Ketiga unsur tersebut berperan sebagai landasan, acuan, sekaligus batasan bagi peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian (Syaputra & Santoso, 2023).

2.3 Teori Stigma Sosial

Stigma sosial merupakan pandangan kearah negatif yang ditujukan kepada masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu sehingga menyebabkan perlakuan berbeda. Ahli Sosiolog Erving Goffman (Rizka et al., 2021) mendefinisikan teori stigma sebagai sebuah proses, yaitu pandangan atau sikap masyarakat memandang kondisi orang lain yang berbeda diasumsikan secara negatif dan mendapat label serta perlakuan yang berbeda (Rahma et al., 2024).

2.4 Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik merujuk pada suatu makna dari simbol yang terbentuk melalui proses interaksi sosial. Tokoh utama teori ini adalah George Herbert Mead. Menurut teori ini, individu memberikan makna terhadap simbol-simbol yang ada di lingkungannya berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan orang lain (Efendi et al., 2024).

2.5 Konsep Penerima Bantuan Sosial

Penerima bantuan sosial adalah individu atau keluarga yang memperoleh bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Program bantuan sosial ditujukan kepada kelompok

masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Didalam pemerintahan, keluarga penerima bantuan sosial disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu keluarga miskin atau rentan yang berpenghasilan rendah dibawh garis kemiskinan.

Berdasarkan penelitain (Kholid, 2025), Secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan) kemiskinan terbagi menjadi:

a. Kemiskinan Kultural

   Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat yang membudaya melekatkan pada kebiasaan yang membelenggu dan melekat dengan kemiskinan.

b. Kemiskinan Struktural

   Kemiskinan yang terjadi akibat sistem sosial yang tidak adil

c. Kemiskinan Relatif

   Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan.

2.6 Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini bahwa kebijakan labelisasi yang diberikan kepada keluarga penerima bantuan sosial merupakan bentuk komunikasi kebijakan publik yang dapat menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat penerima bantuan. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, pemahaman, kondisi sosial, serta manfaat yang diperoleh dari program bantuan sosial. Selain itu, labelisasi Keluarga Tidak Mampu Penerima Bantuan diasumsikan memiliki dampak tertentu terhadap penerima bantuan, baik dalam bentuk penerimaan, penolakan, maupun sikap netral. Oleh karena itu, setiap

penerima bantuan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap kebijakan labelisasi yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

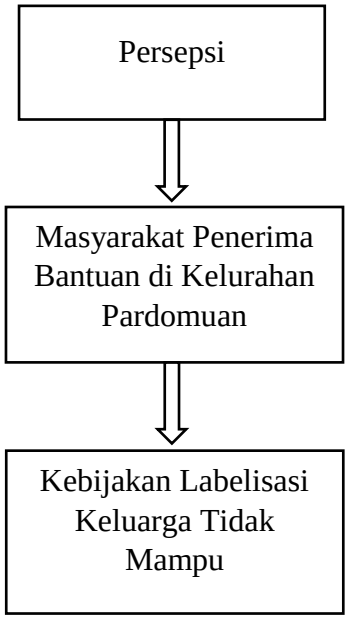
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai persepsi masyarakat penerima bantuan terhadap kebijakan labelisasi keluarga tidak mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, serta tanggapan masyarakat terhadap kebijakan labelisasi yang diterapkan pemerintah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengungkap makna serta realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian, metode kualitatif diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Cresswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian pendidikan di mana peneliti mengandalkan sudut pandang para peserta atau narasumber, sedangkan peneliti mengajukan pertanyaan mendalam, mengajukan pertanyaan terbuka, pengumpulan data sebagian besar terdiri dari ucapan (atau teks) para peserta, menggambarkan dan menganalisis teks tersebut ke dalam tema-tema, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan subjektif dan mengarahkan (yang memicu pertanyaan lanjutan) (Safarudin et al., 2023).

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Adapun beberapa konsep yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persepsi Masyarakat

Persepsi berasal dari kata *Perceptio* yang artinya tanggapan. Tanggapan berupa gambaran yang tinggal didalam kesadaan setelah mengamati (Huda et al., 2024). Persepsi adalah cara pandang, perbuatan, dan deskripsi yang diberikan seseorang terhadap sesuatu objek yang berada di lingkungannya. Persepsi tidak hanya bergantung pada ransangan fisik tetapi juga pada lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan (Juniarta et al., 2022).

b. Masyarakat Penerima Bantuan

Masyarakat penerima bantuan disebut dengan klasifikasi Keluarga Penerima Manfaat yaitu keluarga miskin atau rentan yang memenuhi kriteria dan persyaratan dan secara resmi ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima bantuan sosial. Syarat utama sebagai KPM adalah tergolong kedalam keluarga berpenghasilan rendah yang berada dibawah garis kemiskinan di wilayah setempat.

c. Labelisasi

Labelisasi merupakan proses penyematan, penandaan, atau pencantuman sebuah simbol yang membranding suatu objek. Labelisasi keluarga tidak mampu adalah tanda, identitas terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu masyarakat yang memiliki permasalahan sosial ekonomi yang berasal dari Desil 1 hingga Desil 4 beserta beberapa pertimbangan lainnya.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Kelurahan Pardomuan	- Pengetahuan Masyarakat - Tanggapan Masyarakat - Sikap Masyarakat
2	Kebijakan Labelisasi Keluarga Tidak Mampu	- Manfaat Labelisasi - Ketepatan Sasaran - Transparansi Data Penerima

Sumber: Hasil olahan 2026

Berdasarkan table diatas, dapat dijelaskan bahwa :

Pengetahuan masyarakat merujuk pada pemahaman masyarakat Kelurahan Pardomuan mengenai kebijakan Pemerintah mengenai Labelisasi Keluarga Tidak Mampu. Pengetahuan tersebut meliputi tujuan terhadap kebijakan tersebut, manfaat yang diperoleh, mekanisme pelaksanaan, serta alasan penerapan terhadap kebijakan labelisasi. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Tanggapan masyarakat merujuk kepada respon atau penilaian yang diberikan masyarakat terhadap kebijakan labelisasi, baik berupa penerimaan, dukungan, kritik ataupun penolakan. Tanggapan mencerminkan hasil interpretasi masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan.

Sikap masyarakat merujuk kepada kecenderungan perilaku masyarakat akibat dari dampak terhadap kebijakan labelisasi yang berupa sikap positif, sikap netral, ataupun sikap negatif. Sikap menunjukkan kesiapan individu dalam menerima ataupun menolak kebijakan labelisasi tersebut.

Manfaat labelisasi merujuk kepada pandangan masyarakat terhadap nilai guna kebijakan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial, terutama dalam membantu proses identifikasi penerima, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memastikan distribusi bantuan sosial berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Ketepatan sasara merujuk kepada penilaian masyarakat mengenai kesesuaian penerima bantuan dengan kriteria rumah tangga berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kategori ini berfungsi untuk mengukur apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkannya.

Transparansi data penerima merujuk pada keterbukaan dalam pengelolaan dan penyampaian suatu program yang dapat diakses atau dipertanyakan oleh pihak yang berkepentingan. Persepsi masyarakat mengenai keterbukaan informasi terkait penerima bantuan sosial. Transparansi ditunjukkan melalui kemudahan masyarakat mengetahui status penerima bantuan dan proses penetapan penerima manfaat.

3.5 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah 8 orang masyarakat, individu dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, yaitu kebijakan labelisasi keluarga tidak mampu di wilayah kelurahan pardomuan.

Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertibangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Pada teknik ini sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu yang dirumuskan terlebih dahulu untuk digunakan dalam penelitian (Gunawan et al., 2023). Informan berasal dari masyarakat yang mengalami secara langsung proses labelisasi pada tempat tinggalnya. Melalui informan tersebut, peneliti diharapkan memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, serta tanggapan masyarakat terhadap kebijakan labelisasi yang diterapkan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalan penelitian. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan informan (*interviewee*) sebagai sumber informasi melalui komunikasi langsung.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dan responden yang bersifat dua arah. Menurut Norman K. Denzin (Black & Champion, 1976), wawancara adalah percakapan tatap muka yang memungkinkan salah satu pihak memperoleh informasi dari pihak lainnya. Di sisi lain, Dean J. Champion dan James A. Black (1976) menjelaskan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal (langsung) dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Menurut True (1983), wawancara adalah percakapan antara dua individu yang membahas topik tertentu dalam proses komunikasi interaktif yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih rinci melalui serangkaian pertanyaan yang terfokus.

Metode wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, pengalaman, dan pemikiran responden secara lebih mendalam melalui interaksi langsung. Faktanya, penelitian yang menggunakan metode wawancara mencakup beberapa tahap penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan wawancara, dan analisis data yang diperoleh (Rivaldi et al., 2023).

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses dalam meninjau suatu objek yang dilakukan dengan pencatatan, pengambilan gambar, dan perekaman tentang situasi, kondisi dan fenomena yang terjadi untuk memperoleh data/informasi. Dengan dilakukannya observasi dapat diperoleh suatu gambaran nyata mengenai kondisi lingkungannya masyarakat. Hasil pengamatan menjadi landasan untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan yang diperoleh (Zanariyah, 2024).

c. Dokumentasi

Dokumentasi artinya menyajikan informasi atau bukti resmi dengan melalui pencatatan dan mengelompokkan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video dan lain-lain. Dokumentasi merupakan bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam mencari, menyelidiki, mengguanakan, menyediakan dokumen untuk memperoleh informasi, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan (Hasan et al., 2022).

3.7 Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu upaya dalam menyimpulka data, memfokuskan data, kemudian memilah data kedalam satu konsep tertentu sehingga penelitian, menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis (Millah et al., 2023).

b. Penyajian Data

Data disusun secara tertata agar peneliti lebih mudah memahami dan menarik kesimpulan yang akurat

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Metode yang digunakan untuk menafsirkan data yang telah dianalisis dan memverifikasi hasil temuan untuk memastikan validitasnya.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

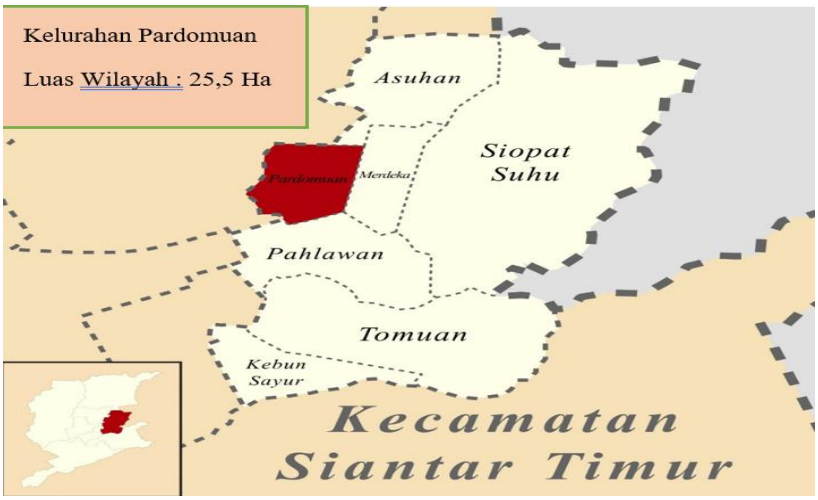
a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Rentang Waktu tersebut mencakup seluruh tahapan penelitian, pengerjaan proposal penelitian, pengurusan izin penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data lapangan, hingga tahapan analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Kode Pos 21131, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Gambar 3.2 Peta Kelurahan Pardomuan



Sumber: Google 2026

Secara geografis, Kelurahan Pardomuan yang terletak di Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, membentang di atas wilayah seluas 25,5 Ha. Wilayah ini terbagi secara teritorial menjadi Lingkungan I dan II dengan garis pembatas berupa jalur lintasan kereta api.

Tabel 1.1 Data Demografi Kelurahan Pardomuan

Kategorisasi	Keterangan
Jumlah Keluarga	1.542 Keluarga
Jumlah Penduduk	4.724 Jiwa
Jumlah Penduduk Laki-laki	2.263 Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	2.461 Jiwa
Jumlah Penerima BANSOS PKH	149 Keluarga
Jumlah Penerima BANSOS BPNT	256 Keluarga

Sumber : Hasil Observasi peneliti 2026

Berdasarkan data demografi yang diperoleh dari Divisi Sub Bagian Kesra Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar, wilayah Kelurahan Pardomuan mencakup 1.542 kepala keluarga dengan total populasi sebanyak 4.724 jiwa (2.263 laki-laki dan 2.461 perempuan). Gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat setempat ditunjukkan oleh proporsi penerima bantuan pemerintah, di mana terdapat 149 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan 256 keluarga penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

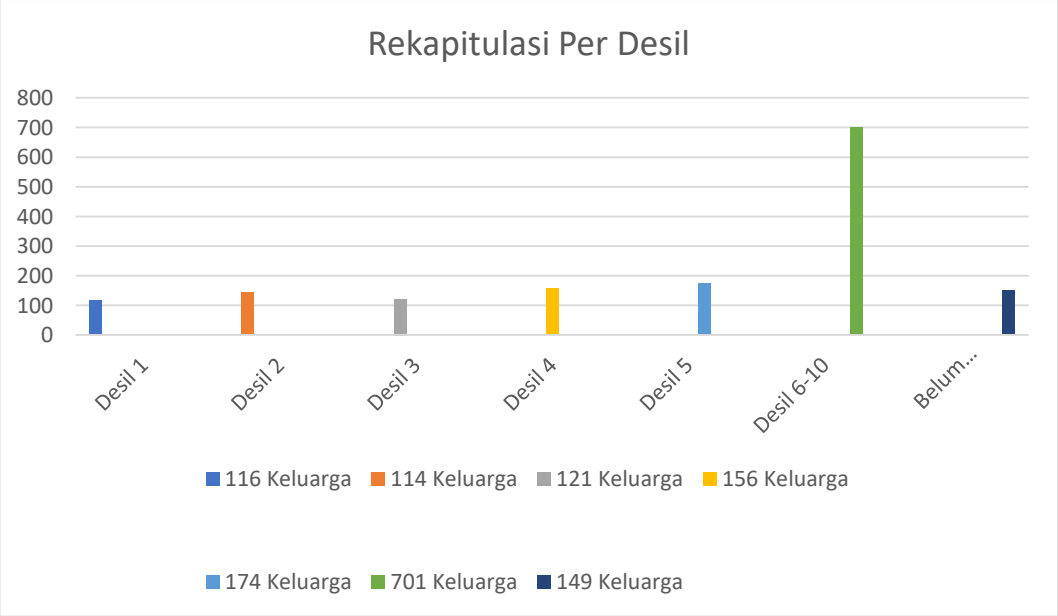
Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat penerima bantuan terhadap kebijakan labelisasi keluarga tidak mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu masyarakat yang memiliki keterlibatan dan pengalaman langsung terhadap kebijakan pelabelan rumah yang bertuliskan "Keluarga Tidak Mampu Penerima Bansos", sehingga informan memiliki pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini juga didukung oleh data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Pardomuan, meliputi kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan Desil, dan data penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini disusun berdasarkan indikator penelitian yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, meliputi persepsi masyarakat, masyarakat penerima bantuan, serta kebijakan pelabelan terhadap keluarga tidak mampu. Data hasil wawancara disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang didukung dengan kutipan langsung dari informan penelitian sehingga dapat memperkuat temuan penelitian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai persepsi masyarakat penerima bantuan terhadap kebijakan labelisasi keluarga tidak mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar.

Gambar 4.1 Klasifikasi Desil Masyarakat Pardomuan



Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan rekapitulasi data sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Pardomuan, tingkat kesejahteraan penduduk terklasifikasi ke dalam beberapa tingkatan desil. Pada kelompok masyarakat desil 1 yang merepresentasikan tingkat ekonomi terendah, tercatat sebanyak 440 individu dari 116 keluarga, disusul oleh desil 2 sebanyak 595 individu dari 114 keluarga, desil 3 sebanyak 462 individu dari 121 keluarga, dan desil 4 sebanyak 517 individu dari 156 keluarga. Sementara itu, kelompok desil 5 mencakup 538 individu dari 174 keluarga. Mayoritas populasi berada pada kelompok desil 6 hingga 10 yang tergolong memiliki tingkat kesejahteraan relatif menengah hingga atas, yakni

mencapai 2.036 individu dari 701 keluarga. Di samping populasi yang telah terpetakan tersebut, masih terdapat 538 individu dari 149 keluarga yang belum masuk ke dalam tahapan pemeringkatan desil. Data distribusi ini menjadi basis faktual dalam menentukan derajat kerentanan ekonomi sekaligus pemetaaan prioritas intervensi program perlindungan sosial di wilayah setempat.

4.1.1 Tabel Informan Penelitian

Tabel 4.1 Identitas Informan Penelitian

NO	Nama	Pekerjaan	Usia (Tahun)	Pendapatan Keluarga	Jenis Bantuan
1	Ovinaria Hastuti	Relawan BKKBN	33	1.000.000	**PKH/BPNT**
2	Siti Hajar	Pedagang	47	1.000.000	**BPNT**
3	Muliati Tanjung	Pedagang	68	300.000	**PKH/BPNT**
4	Rahmadani Damanik	PRT	47	1.300.000	**BPNT**
5	Anggi Sukma	Mahasiswa	22	1.500.000	**PKH/BPNT**
6	Yuniati Tanjung	Pedagang	54	1.500.000	**BPNT**
7	Rosnah	Pedagang	59	1.500.000	**BPNT**
8	Nadia	Mahasiswa	21	1.500.000	**BPNT**

Sumber: Hasil Penelitian 2026

4.1.2. Deskripsi Informan

Delapan informan tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan dan pengalaman langsung dalam kebijakan labelisasi stempel rumah yang bertuliskan keluarga tidak mampu penerima BANSOS. Melalui informan tersebut, peneliti memperoleh data yang relevan mengenai persepsi masyarakat penerima bantuan terhadap kebijakan labelisasi keluarga tidak mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar.

Informan pertama adalah Ovinaria Hastuti (33 tahun), seorang relawan BKKBN di Kelurahan Pardomuan. Sebagai relawan yang terlibat dalam kegiatan di masyarakat, informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai kebijakan labelisasi rumah penerima bantuan sosial (BANSOS). Selain itu, informan juga memahami kondisi penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Pardomuan, mulai dari proses pendataan hingga pelaksanaan penyalurannya kepada masyarakat penerima manfaat.

Informan kedua adalah Siti Hajar (47 tahun), seorang pedagang yang memiliki pengalaman secara langsung terhadap kebijakan labelisasi rumah penerima BANSOS.

Informan ketiga adalah Muliati Tanjung (68 tahun), seorang lansia yang berdagang dengan penghasilan keluarga kategori Desil 1, sangat bergantung pada bantuan dana dari Pemerintah, tercatat sebagai penerima BANSOS Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia, sehingga dapat memberikan persepsi mengenai kebijakan labelisasi yang dialami.

Informan keempat adalah Rahmadani Damanik (47 tahun), seorang pembantu rumah tangga yang tercatat sebagai penerima BANSOS Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memiliki pengalaman labelisasi rumah penerima BANSOS.

Informan kelima adalah Anggi Sukma (22 tahun), seorang mahasiswa aktif yang berasal dari keluarga penerima BANSOS, mengalami labelisasi pada rumah orang tua. Sehingga dapat memberikan persepsi anak terhadap kebijakan labelisasi pada rumah orang tua.

Informan keenam adalah Yuniati Tanjung (54 tahun), seorang orang tua tunggal yang berdagang sarapan pagi, sudah terdaftar sebagai penerima BANSOS selama 10 Tahun, sehingga memiliki pengalaman yang cukup mendalam terhadap bantuan sosial di wilayah Pardomuan.

Informan ketujuh adalah Rosnah (59 tahun), seorang ibu yang berdagang kue dan tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga dapat memberi persepsi mengenai kebijakan labelisasi di tempat tinggalnya.

Informan kedelapan adalah Nadia (21 tahun), seorang mahasiswa aktif yang rumah orang tuanya menerima label Keluarga Tidak Mampu sebagai penerima bantuan sosial. Pengalaman tersebut memberikan informan pemahaman secara langsung mengenai penerapan kebijakan labelisasi serta dampaknya terhadap penerima bantuan, sehingga informan mampu memberikan pandangan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut.

4.1.3 Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh informan mengenai kebijakan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial (BANSOS). Aspek pengetahuan tersebut mencakup pemahaman masyarakat mengenai waktu mulai diterapkannya kebijakan labelisasi, jenis bantuan sosial yang diterima, kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan, serta maksud dan tujuan dari penerapan kebijakan tersebut. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan labelisasi menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana informasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah telah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat dapat menggambarkan tingkat pemahaman penerima bantuan sosial terhadap kebijakan yang diterapkan, sekaligus menunjukkan sejauh mana pemerintah telah melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait pelaksanaan program bantuan sosial kepada masyarakat.

Anggi menjelaskan bahwa penerapan kebijakan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial, baik terkait dengan awal mula penerapan label, perubahan bentuk dan pesan komunikasi pada label, maupun ketentuan dalam pemasangannya. Informan menjelaskan bahwa kebijakan labelisasi telah diterapkan sejak lama dan mengalami perubahan, dari label berwarna biru dengan tulisan “Keluarga Penerima Manfaat” menjadi label berwarna merah dengan tulisan “Keluarga Tidak Mampu Penerima Bansos”. Selain itu, informan memahami bahwa pemasangan label merupakan suatu kewajiban bagi keluarga

penerima bantuan sosial, dengan adanya konsekuensi berupa pemblokiran/penghentian bantuan apabila label tersebut tidak dipasang. Hal ini menunjukkan bahwa informan telah memperoleh informasi dan memahami kebijakan labelisasi sebagai bagian dari mekanisme penyaluran bantuan sosial, termasuk aturan dan konsekuensi yang berkaitan dengan penerapannya.

> *"Rumah ini dilabelnya Sudah lama sih Kak, dulu bentuk labelnya kan bukan yang warna merah kayak gini. Warnanya itu kayak stiker biru gitulah. Nah, kalau enggak salah tulisannya itu "Keluarga Penerima Manfaat". Nah, kalau belakangan ini, kalau enggak salah sekitar 2 tahun yang lalu, diganti labelnya jadi warna merah, tulisannya juga berubah jadi "Keluarga Tidak Mampu" kalau enggak salah sih. Dari awal dijelaskan tuh kalau label ini sifatnya wajib, jadi kalau enggak dipasang otomatis bantuan kita tuh kena blokir, gitu." (Anggi)*

Selanjutnya Yuniati menerangkan bahwa dirinya telah menerima BPNT sejak tahun 2016, sementara labelisasi berupa stiker biru telah diterapkan selama kurang lebih tujuh tahun dan kemudian mengalami perubahan menjadi stempel merah dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir. Informan juga memahami bahwa pemasangan label merupakan suatu kewajiban bagi penerima bantuan sosial bantuan dan berfungsi sebagai tanda atau identitas bahwa penghuni rumah tersebut merupakan keluarga tidak mampu yang menerima bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan informan terhadap kebijakan labelisasi lebih berfokus pada aspek kewajiban pemasangan dan fungsi label sebagai penanda status penerima bantuan sosial.

> *"Rumah dilabel stiker biru sudah 7 tahun, tapi stempel merah baru 2 tahun ini. Tapi kalau Ibu penerima bantuan BPNT sudah sejak tahun 2016. Informasi yang diterima cuma dibilang kalau penerima wajib ditempel stiker-nya. sebagai tanda lah bahwa Ibu ini keluarga tidak mampu yang menerima bansos." (Yuniati)*

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial tergolong cukup baik. Para informan mengetahui bahwa kebijakan labelisasi telah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu dan memahami adanya perubahan bentuk serta isi pesan pada label, yaitu dari stiker berwarna biru bertuliskan Keluarga Penerima Manfaat menjadi label berwarna merah bertuliskan Keluarga Tidak Mampu Penerima Bansos

Masyarakat juga memahami bahwa pemasangan label merupakan kewajiban bagi penerima bantuan sosial dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak pada penghentian atau pemblokiran bantuan. Meskipun demikian, pengetahuan informan masih lebih berfokus pada aspek teknis pelaksanaan kebijakan, seperti waktu penerapan, perubahan bentuk label, fungsi label sebagai penanda penerima bantuan, serta kewajiban pemasangannya. Sementara itu, pemahaman mengenai tujuan utama kebijakan labelisasi, seperti meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, dan mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima masyarakat masih didominasi oleh penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan dibandingkan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih komprehensif agar masyarakat tidak hanya memahami kewajiban pemasangan label, tetapi juga mengetahui manfaat dan tujuan kebijakan labelisasi sebagai upaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.

4.1.4 Tanggapan masyarakat

Tanggapan masyarakat adalah respon, pendapat, atau penilaian masyarakat terhadap suatu kebijakan, program, atau langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam konteks pemberian bantuan sosial, reaksi masyarakat adalah pandangan atau tanggapan masyarakat terhadap proses pengumpulan data, penentuan penerima, transparansi informasi, serta pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh instansi terkait. Reaksi ini dapat bersifat positif maupun negatif, misalnya kepuasan, persetujuan, dukungan, kritik, keluhan, atau saran terkait pelaksanaan program bantuan sosial.

Selanjutnya Nadia memberikan tanggapan yang positif terhadap penerapan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial. Informan tidak merasa malu atau keberatan dengan pemasangan label karena menganggap bahwa label tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya sebagai penerima bantuan sosial. Selain itu, informan menilai bahwa dengan adanya bantuan sosial yang diterima memberikan manfaat nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga, seperti pembelian beras dan kebutuhan pokok lainnya, serta turut membantu meringankan biaya pendidikan. Informan memperlihatkan adanya penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan bantuan sosial, karena program tersebut dinilai memberikan manfaat dalam meringankan beban ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Enggak malulah distiker gini, karena memang sesuai sama keadaan kami kak. Justru terbantu, karena dari sini sedikit bisa bantu penuhi kebutuhan

keluarga kami. Untuk beli beras, sembako, kadang untuk bantu biaya kuliaku juga." (Nadia)

Muliati menyatakan tidak menolak pemasangan stempel dan bersedia menerimanya. Sikap tersebut didasarkan pada kebutuhan informan terhadap bantuan sosial yang diterima, sehingga pemasangan label dipandang sebagai bagian dari proses untuk memperoleh dan mempertahankan bantuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, pernyataan ini mencerminkan adanya penerimaan dan persetujuan terhadap kebijakan labelisasi karena manfaat bantuan sosial yang diperoleh dinilai lebih penting dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

"Saya menerima stempel ini,enggak nolak. Memang ditanyain kami itu,"macam mana Bu? Setuju atau enggak?" Ya Namanya butuh, ya bilang setujulah, ya senang." (Muliati)

Selanjutnya, Rosnah memberikan tanggapan yang besifat abbivalen (beragam) terhadap penerapan labelisasi pada rumah penerima BANSOS. Di satu sisi, informan merasa bersyukur dan terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah karena kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan keluarga. Namun, di sisi lain, informan merasa kurang nyaman dengan penggunaan label "Keluarga Tidak Mampu" karena dianggap memberikan kesan negatif dan kurang sesuai dengan kondisi dirinya yang masih berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri. Informan juga membandingkan label tersebut dengan label sebelumnya, yaitu "Keluarga Penerima Manfaat", yang dinilai lebih baik, lebih netral, dan tidak memberikan

kesan merendahkan. Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa masyarakat menerima manfaat bantuan sosial dan mengapresiasi dukungan pemerintah, tetapi memiliki keberatan terhadap penggunaan istilah “Tidak Mampu” pada label karena dapat memengaruhi perasaan, harga diri, dan persepsi terhadap kondisi sosial ekonomi penerima bantuan.

> *“Ya karena kitanya enggak mampu ya kan, Nak, Kayak mana ya? Ya ada senangnya, kadang ada sedihnya, ya kan. Sebenarnya kita kan masih bisa berusaha sikit-sikit gitu, tapi ya syukur jugalah kalau misalnya ada yang bantu dari pemerintah gitu sendiri, ya kan. Memang sebetulnya enggak bagus ya kan, "Tidak Mampu". Mana tahu kita kan sikit-sikit kita kan punya duit, ya kan, punya uang sikit-sikit. Kalau dulu kan tulisannya itu "Keluarga Penerima Manfaat", ya kan. Nah, itu lebih bagus lagi rasanya. Iya, lebih bersih rasanya lagi. Ini "Tak Mampu" Terlalu kali lah kita ya kan.” (Rosnah)*

Berbanding terbalik dengan informan yang sebelumnya, Ovinaria menunjukkan adanya tanggapan kritis terhadap penggunaan label “Keluarga Tidak Mampu” sekaligus dukungan terhadap fungsi labelisasi sebagai upaya pengawasan dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Informan menilai bahwa istilah “Keluarga Tidak Mampu” kurang tepat dan mengusulkan penggunaan label yang lebih tegas dengan perubahan pesan komunikasi menjadi “Keluarga Miskin Penerima BANSOS”. Selain itu, informan berpendapat bahwa labelisasi dapat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial agar masyarakat yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan merasa terdorong untuk tidak lagi menerima bantuan, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa informan memandang kebijakan labelisasi tidak hanya sebagai identitas penerima bantuan,

tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mencegah terjadinya penerimaan bantuan oleh pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria.

> *“Sebenarnya tulisan "Keluarga Tidak Mampu" itu kurang pantas. Lebih ekstrem lagi kalau bisa diganti jadi "Keluarga Miskin Penerima Bansos" Tujuannya Biar mereka yang seharusnya udah tidak layak mendapatkan itu malu juga gitu ya, karena masih banyak yang belum tepat sasaran.” (Ovinaria)*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap kebijakan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial bersifat beragam, yaitu positif, ambivalen, dan kritis. Sebagian informan memberikan tanggapan positif karena menilai bahwa bantuan sosial yang diterima mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan pangan dan biaya pendidikan. Oleh karena itu, pemasangan label tidak dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan sebagai konsekuensi yang dapat diterima selama bantuan sosial masih memberikan manfaat bagi kondisi ekonomi keluarga.

Di sisi lain, terdapat informan yang menunjukkan tanggapan ambivalen. Informan mengaku bersyukur karena memperoleh bantuan dari pemerintah, namun pada saat yang sama merasa kurang nyaman terhadap penggunaan istilah "Keluarga Tidak Mampu" pada label. Istilah tersebut dinilai memberikan kesan negatif dan kurang mencerminkan kondisi penerima yang masih berupaya memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Dibandingkan dengan label sebelumnya yang bertuliskan "Keluarga Penerima Manfaat", informan menilai bahwa redaksi tersebut lebih netral dan tidak menimbulkan kesan merendahkan.

Selain itu, terdapat pula tanggapan yang bersifat kritis terhadap kebijakan labelisasi. Informan mendukung keberadaan label sebagai bentuk identifikasi dan

pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial, namun mengusulkan agar pesan komunikasi pada label dibuat lebih tegas dengan menggunakan redaksi "Keluarga Miskin Penerima BANSOS". Menurut informan, penggunaan redaksi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan untuk tidak lagi mempertahankan statusnya sebagai penerima bantuan sosial, sehingga penyaluran bantuan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya menerima kebijakan labelisasi karena manfaat bantuan sosial yang diperoleh, tetapi memiliki pandangan yang berbeda mengenai redaksi pesan komunikasi yang digunakan pada label. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan pesan komunikasi yang tepat, mudah dipahami, dan mampu mencapai tujuan transparansi serta ketepatan sasaran tanpa mengabaikan dampak sosial yang dapat ditimbulkan bagi penerima bantuan.

4.1.5 Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat adalah suatu bentuk reaksi, pendapat, penilaian, atau perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap kebijakan, program, atau keadaan tertentu yang terjadi di lingkungannya. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, sikap masyarakat dapat diamati dari cara mereka memandang, bereaksi, dan menilai proses penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Sikap ini dapat terwujud dalam bentuk dukungan, persetujuan, kepuasan, kritik, atau ketidakpuasan terkait proses pencatatan data, penentuan penerima yang akurat, transparansi, serta mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Nadia menunjukkan sikap yang positif terhadap kebijakan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial. Informan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima sindiran atau perlakuan negatif dari masyarakat sekitar karena kondisi ekonomi keluarganya memang telah diketahui oleh lingkungan tempat tinggal. Menurut informan, tetangga memahami dan menganggap wajar bahwa keluarganya menerima bantuan sosial, sehingga keberadaan label pada rumah tidak menimbulkan permasalahan maupun memengaruhi hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap masyarakat di lingkungan informan cenderung menerima keberadaan penerima bantuan sosial tanpa memberikan stigma atau perlakuan diskriminatif.

> *"Enggak ada sindiran sih, Karena memang sesuai sama keadaan kami. Tetangga maklum dan mewajarkan kalau kami dapat bansos, kok. ada enggak mempengaruhi hubungan Nadia dengan lingkungan sekitar." (Nadia)*

Berbanding terbalik dengan pernyataan Ovinaria menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap penerimaan bantuan sosial dapat menimbulkan respons dan komentar dari lingkungan sekitar, termasuk adanya kecemburuan sosial terhadap penerima bantuan. Meskipun demikian, informan memilih untuk tidak terlalu memperhatikan komentar tersebut karena meyakini bahwa dirinya memang layak dan berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Informan juga mengakui bahwa berdasarkan pengalamannya penerimaan bantuan sosial sedikit memengaruhi hubungan sosial dengan lingkungan sekitar, tetapi menyikapinya dengan bersikap acuh atau tidak mempermasalahkan pandangan orang lain.

Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan sikap penerima bantuan yang tetap menerima dan mempertahankan haknya atas bantuan sosial meskipun menghadapi penilaian negatif dari masyarakat sekitar, karena bantuan tersebut dianggap telah diberikan berdasarkan kondisi dan kelayakan penerima.

> *"Kalo nerima komentar itu banyak, ya… Tapi ya namanya memang kita layak dan pantas mendapatkan, ya biarin aja gitu, mungkin kecemburuan sosial. Bahkan yang mengatai itu sebagian dari ASN. Tapi yaudalah, cuek aja sih. Jadi BANSOS ini sedikit mempengaruhi hubungan dengan lingkungan sekitar, Cuma masa bodoh aja, karena BANSOS ini dari pemerintah, dan memang kita layak." (Ovinaria)*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat terhadap kebijakan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial menunjukkan respons yang beragam, dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan masing-masing penerima bantuan. Sebagian informan menunjukkan sikap yang positif karena merasa bahwa labelisasi tidak menimbulkan permasalahan dalam hubungan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh lingkungan sekitar yang telah mengetahui kondisi ekonomi keluarga penerima, sehingga keberadaan label dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak menimbulkan sindiran maupun perlakuan diskriminatif.

Di sisi lain, terdapat informan yang mengalami komentar, cibiran, dan kecemburuan sosial dari masyarakat setelah rumahnya diberi label sebagai penerima bantuan sosial. Meskipun demikian, informan tetap menunjukkan sikap menerima terhadap kebijakan tersebut dan memilih untuk tidak menghiraukan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Sikap tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa bantuan sosial diterima sesuai dengan kondisi ekonomi dan

kelayakan yang dimiliki, sehingga keberadaan label tidak mengurangi haknya sebagai penerima bantuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap kebijakan labelisasi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan label itu sendiri, tetapi juga oleh penerimaan lingkungan sosial terhadap kondisi ekonomi penerima bantuan. Lingkungan yang memahami kondisi penerima cenderung menciptakan hubungan sosial yang tetap harmonis, sedangkan lingkungan yang memberikan penilaian negatif dapat memunculkan kecemburuan sosial dan memengaruhi interaksi sosial penerima bantuan. Namun demikian, sebagian besar penerima bantuan tetap mempertahankan sikap menerima terhadap kebijakan labelisasi karena manfaat bantuan sosial yang diperoleh dinilai lebih besar dibandingkan dampak sosial yang dirasakan.

4.1.6 Manfaat Labelisasi

Pemberian label adalah proses pemasangan tanda atau label pada rumah atau tempat tinggal yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Tujuan pemberian label adalah untuk mempublikasikan informasi mengenai kondisi penerima bantuan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa bantuan tersebut diberikan kepada rumah tangga yang telah terdaftar dan memenuhi kriteria penerimaan.

Dalam konteks penyaluran tunjangan kesejahteraan sosial, manfaat penandaan antara lain peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi, memudahkan masyarakat umum untuk mengidentifikasi penerima bantuan, serta berfungsi sebagai sarana pengawasan sosial terhadap penyaluran tunjangan

kesejahteraan sosial. Selain itu, penandaan juga membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi kelayakan penerima tunjangan kesejahteraan sosial.

Pernyataan Anggi menunjukkan bahwa labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial dipandang memiliki manfaat yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat dibandingkan bagi penerima bantuan secara langsung. Bagi pemerintah, keberadaan label dapat mempermudah proses identifikasi dan pemantauan terhadap rumah tangga yang menerima bantuan sosial. Sementara itu, bagi masyarakat, labelisasi berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui pihak-pihak yang menerima bantuan sosial serta dapat menjadi sarana pengawasan sosial terhadap ketepatan penerima bantuan. Informan juga menilai bahwa pencantuman status “Tidak Mampu” secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menilai kembali kelayakan dirinya sebagai penerima bantuan, sehingga diharapkan bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

> *“Kalau manfaat labelnya itu sendiri di kami ya enggak ada. Cuma kan jadi tanda kalau misalnya yang punya rumah kan memang orang enggak punya. Kemungkinan kalau manfaat untuk pemerintah ada, kayak lebih mempermudah merekalah untuk tahu yang mana rumah penerima bansos, kayak gitu. Tapi dengan ini cukup membantu sih karena kan dengan adanya tulisan itu kita jadi tahu siapa-siapa aja yang menerima bansosnya. Terus tulisan "tidak mampu" itu kan secara enggak langsung membuka kesadaran kalau misalnya mereka berhak enggak menerima bansos tersebut.” (Anggi)*

Informan Rahmadani berpendapat bahwa labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial dipandang memiliki manfaat sebagai penanda kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan**.** Informan memahami bahwa keberadaan label dapat

membuat masyarakat sekitar mengetahui bahwa penghuni rumah tersebut berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu dan membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian, labelisasi berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai status penerima bantuan sosial, sekaligus memberikan gambaran bahwa bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang dianggap membutuhkan dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

> *"Manfaatnya jadi ditengok orang kita enggak mampu lah kan, orang susah, orang yang perlu dapat bantuan gitu." (Rahmadani)*

Selanjunya Muliati menggambarkan bahwa labelisasi dapat dipahami sebagai penanda identitas keluarga penerima bantuan sosial yang memudahkan masyarakat maupun pemerintah dalam mengenali penerima manfaat. Bagi informan, keberadaan label memiliki fungsi administratif karena menunjukkan secara terbuka siapa yang berhak menerima bantuan. Selain itu, informan juga mengaitkan labelisasi dengan manfaat yang dirasakan secara langsung, yaitu tetap memperoleh bantuan PKH lansia yang menjadi sumber dukungan ekonomi bagi keluarga. Dengan demikian, makna manfaat labelisasi menurut informan tidak hanya terletak pada fungsi identifikasi, tetapi juga kebermanfaatan bantuan sosial yang diterimanya.

> *"Manfaatnya ya sebagai tanda kalau awak menerima bantuan. Ya kalau enggak diapakan gitu, ya enggak tahulah, Siapa-siapa yang dapat. Jadi kan siapa yang dapat, kan ditempel gitu lah. Kalau enggak, mana ada, mana tahu, kan. Manfaat yang saya rasakan itu tiap bulan bantuan PKH lansia itu masuk 600.000 jadi 1.800.000 tiap tiga bulan sekali, ngambilnya ke brilink gitulah." (Muliati)*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manfaat labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial dipahami oleh informan sebagai sarana

identifikasi, keterbukaan informasi, dan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial. Sebagian besar informan menilai bahwa manfaat labelisasi lebih banyak dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat dibandingkan oleh penerima bantuan secara langsung. Keberadaan label dinilai mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi dan memantau rumah tangga penerima bantuan sosial, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai siapa saja yang menerima bantuan sehingga dapat mendukung transparansi dan pengawasan sosial terhadap ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Selain berfungsi sebagai bentuk identifikasi, beberapa informan memandang bahwa labelisasi juga menjadi penanda kondisi sosial ekonomi penerima bantuan. Keberadaan label menunjukkan bahwa penghuni rumah merupakan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengetahui status penerima bantuan secara terbuka. Bahkan, terdapat informan yang berpendapat bahwa pencantuman status "Tidak Mampu" dapat mendorong masyarakat untuk lebih jujur dalam menilai kelayakan dirinya sebagai penerima bantuan sosial, sehingga diharapkan bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Di sisi lain, sebagian informan mengaitkan manfaat labelisasi dengan manfaat bantuan sosial yang diterima. Bagi mereka, label dipandang sebagai identitas yang menandai hak sebagai penerima bantuan, sedangkan manfaat yang paling dirasakan adalah keberlangsungan bantuan sosial yang mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa makna manfaat labelisasi tidak hanya dipahami sebagai instrumen administrasi dan

transparansi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan akses masyarakat terhadap program bantuan sosial yang memberikan dukungan bagi kondisi ekonomi keluarga.

4.1.7 Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran mengacu pada situasi di mana program dan kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial, diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat untuk menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dengan memastikan terpenuhinya kriteria yang berlaku. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, kesesuaian penerima manfaat berarti bantuan tersebut diberikan kepada orang-orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat, yang memang membutuhkan bantuan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang membutuhkannya, serta mencegah terjadinya kesalahan dalam pemilihan penerima manfaat.

Berdasarkan penjelasan dari Ovinaria bahwa penerapan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial secara teoritis dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengawasi penerima bantuan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan terkait ketepatan sasaran. Informan menilai bahwa masih terdapat masyarakat yang secara kondisi ekonomi sudah tidak layak menerima bantuan, tetapi tetap terdaftar sebagai penerima, termasuk masyarakat yang memiliki kondisi rumah yang tergolong mampu. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan labelisasi belum sepenuhnya mampu menjamin bantuan sosial diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Informan juga

menekankan pentingnya perbaikan proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan agar pemerintah dapat membedakan masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan dengan mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria. Pernyataan Ovinaria mengindikasikan bahwa permasalahan ketepatan sasaran bantuan sosial lebih berkaitan dengan akurasi pendataan dan pemutakhiran data penerima, sehingga diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

> *"Sebenarnya kalau kita berpikir logikanya memang iya mempermudah, tapi toh masih juga banyak yang udah enggak layak itu masih mendapatkan. Harusnya pemerintah itu melek juga, bahwa biar mereka itu bisa lihat mana yang memang benar-benar pantas mendapatkan, mana yang tidak. Karena masih dikasih stempel yang jelas-jelas permanen ya, masih banyak yang gak tepat sasaran, ada yang rumahnya gedung. Ada yang malu sampai ke ujung-ujung buat stempelnya itu gitu loh. Tetapi gitu pun gimana ya, kembali kepada pendataannya lagi lah, biar mereka tuh tepat sasaran lagi. Makanya kalau dibilang "Keluarga Tidak Mampu" tuh belum ekstrem, karena masih banyak yang rumahnya gedung itu masih menerima. Bahkan yang rumahnya enggak layak, kita bilang di situ kamar mandi, di situ tempat tidur, itu sama sekali enggak tersentuh bantuan. Yang mau tumbang lah kita bilang, bahkan dia itu untuk mencuci, mau buang air aja itu minta air, bahkan harus ke umbul sumur gitu, itu enggak tersentuh sama sekali. Jadi stempel tuh enggak menjamin sebenarnya." (Ovinaria)*

Siti menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, di mana sebagian masyarakat yang dinilai telah memenuhi kriteria dan layak menerima bantuan justru belum mendapatkan bantuan sampai saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penentuan penerima bantuan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, karena terdapat kemungkinan adanya keterbatasan atau ketidaksesuaian dalam pendataan dan penetapan penerima. Siti menegaskan

pentingnya peningkatan akurasi pendataan dan evaluasi secara berkala agar bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih adil dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima.

> *"Ada juga yang dia sudah layak dapat tapi enggak dapat dikasih bantuan, ada juga yang seperti itu. Karena ada yang lebih susah, ya, kan. Seharusnya dapat, tapi enggak dapat bantuan." (Siti)*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial masih belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan labelisasi dinilai dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi penerima bantuan sosial, keberadaan label belum sepenuhnya menjamin bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi sudah tergolong mampu tetapi tetap menerima bantuan sosial, sementara di sisi lain masih ditemukan masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih memprihatinkan justru belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama ketepatan sasaran tidak terletak pada kebijakan labelisasi, melainkan pada proses pendataan, verifikasi, dan pembaruan data penerima bantuan sosial yang belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, masih terjadi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat sehingga tujuan penyaluran bantuan sosial untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi, verifikasi lapangan, serta pembaruan data penerima bantuan

secara berkala agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung secara lebih adil, akurat, dan tepat sasaran.

4.1.8 Transparansi Data Penerima

Transparansi data dalam penyaluran bantuan sosial merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pendataan, penetapan masyarakat penerima, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai bantuan sosial dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Dengan adanya transparansi data, masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pendataan dilakukan, siapa saja yang ditetapkan sebagai penerima bantuan, serta bagaimana mekanisme penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini menjadi salah satu aspek penting dalam mengurangi potensi terjadinya kesalahan, penyalahgunaan, maupun ketidakadilan, dalam proses penyaluran bantuan sosial.

Informan Yuniati menunjukkan bahwa penerapan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial dipandang sebagai salah satu bentuk transparansi dalam penyaluran bantuan. Dengan adanya label yang dipasang secara terbuka, masyarakat dapat mengetahui dan mengidentifikasi rumah mana saja yang menerima bantuan sosial di lingkungan tersebut. Kondisi ini memungkinkan informasi mengenai penerima bantuan dapat diketahui secara lebih terbuka sehingga mengurangi kemungkinan adanya informasi yang ditutup-tutupi dalam proses penyaluran bantuan. Pernyataan Yuniati menunjukkan bahwa labelisasi

berperan dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta mendukung pengawasan sosial terhadap penerima bantuan sosial.

> *"Ya kalau ditempel gini kan bisa kita tengok siapa saja yang menerima bansos. Jadi kan enggak bisa tertutup ditutup-tutupin lagi. Kalo bantuannya masuk biasanya dihubungi melalui RPK untuk cek bantuan kita melalui kartu atm." (Yuniati)*

Pernyataan Ovinaria menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan sosial telah dilaksanakan secara terbuka, di mana informasi mengenai penerima bantuan disampaikan melalui jalur pemerintahan, mulai dari kelurahan hingga kepada ketua RT. Menurut informan, keterbukaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui siapa saja yang menjadi penerima bantuan sosial. Namun, informan juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai penerima bantuan sering kali telah tersebar di masyarakat melalui komunikasi dari mulut ke mulut bahkan sebelum disampaikan secara resmi oleh pihak RT. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penyaluran bantuan sosial tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal pemerintah, tetapi juga didukung oleh penyebaran informasi secara informal di lingkungan masyarakat, sehingga informasi mengenai penerima bantuan menjadi diketahui secara luas.

> *"Terang-terangan dan terbuka. Informasi BANSOS itu dari kelurahan. kalau enggak salah dari kelurahan ke RT. Tapi terkadang sekarang nih karena orang gila bansos ya, belum sampai ke RT, udah tahu sendiri orang itu entah dari mulut ke mulut. Meskipun sudah transparan tapi belum adil, kadang penerima ini sudah meninggal tetap menerima, gitu loh. Seharusnya kan mereka itu pendataan ya, bahwa diketahui ini sudah meninggal, dilaporkan, gitu" (Ovinaria)*

Informan Anggi menunjukkan adanya keraguan terhadap transparansi data penerima bantuan sosial**.** Informan menyampaikan bahwa tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah masih rendah karena setelah label merah dipasang pada rumah penerima bantuan, tidak dilakukan pengecekan atau verifikasi ulang terhadap kondisi penerima bahwa penerima bantuan masih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pernyataan Anggi menggambarkan bahwa transparansi data tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai penerima bantuan, tetapi juga membutuhkan adanya peninjauan ulang secara berkala agar penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung dengan tepat sasaran.

> *"Kalau percaya ke pemerintah itu sedikit kurang percaya. Karena kan setelah label merahnya ditempel juga enggak pernah ada pengecekan ulang lagi sama merekanya." (Anggi)*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan labelisasi pada rumah penerima bantuan sosial dinilai telah meningkatkan transparansi data penerima bantuan. Keberadaan label memungkinkan masyarakat mengetahui secara terbuka rumah tangga yang menerima bantuan sosial, sehingga informasi mengenai penerima bantuan menjadi lebih mudah diakses dan mendukung terciptanya pengawasan sosial dalam proses penyaluran bantuan. Selain itu, transparansi informasi juga didukung melalui penyampaian data penerima dari pemerintah kepada perangkat kelurahan dan ketua RT, serta penyebaran informasi secara informal melalui komunikasi antarwarga.

Meskipun demikian, transparansi data penerima bantuan belum sepenuhnya diikuti dengan akuntabilitas dalam pengelolaan data penerima

bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penerima bantuan yang kondisi sosial ekonominya telah berubah, bahkan terdapat penerima yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Selain itu, sebagian informan mengungkapkan bahwa setelah pemasangan label tidak dilakukan verifikasi maupun pembaruan data secara berkala oleh pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap akurasi data penerima bantuan dan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penyaluran bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai penerima bantuan, tetapi juga memerlukan verifikasi lapangan dan pembaruan data secara berkelanjutan. Dengan demikian, keterbukaan informasi yang telah terwujud melalui kebijakan labelisasi perlu didukung oleh pengelolaan data yang akurat agar penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung secara adil, dan tepat sasaran.

4.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat penerima bantuan terhadap kebijakan labelisasi keluarga tidak mampu dengan teori yang digunakan pada Bab II, yaitu teori persepsi, labelisasi, stigma sosial, interaksi simbolik, dan konsep penerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa persepsi masyarakat penerima bantuan terhadap kebijakan labelisasi "Keluarga Tidak Mampu Penerima Bansos" terbentuk melalui proses penafsiran terhadap pengalaman yang

mereka alami terhadap kebijakan labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Persepsi yang muncul dalam penelitin ini memiliki keberagaman, setiap individu memiliki pandangan yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandangnya. Sebagian orang memandang pelabelan sebagai salah satu bentuk identitas resmi bagi penerima bantuan dengan tujuan memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan data dan melakukan pengawasan, sementara sebagian lainnya menganggap penggunaan istilah “Keluarga Tidak Mampu” memberikan kesan negatif terhadap kondisi sosial ekonomi mereka. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa, meskipun menghadapi kebijakan yang sama, setiap individu menafsirkan makna yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan situasi masing-masing.

Temuan tersebut sejalan dengan teori persepsi Robbins dan Judge yang menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal, dan faktor situasi. Faktor internal terlihat dari pengalaman hidup, kebutuhan ekonomi, tingkat pengetahuan, serta kondisi psikologis penerima bantuan. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan cenderung menerima labelisasi karena menganggap bantuan sosial merupakan hak yang layak diterima sehingga keberadaan label tidak menjadi persoalan, dan lebih mementingkan kebermanfaatan dari bantuan yang disalurkan dalam tiap periodenya. Di sisi lain, beberapa Informan memandang istilah "Keluarga Tidak Mampu" sebagai penyebutan yang kurang tepat karena dianggap memengaruhi harga diri dan citra diri mereka di lingkungan sosial. Berbanding terbalik dengan pemikiran salah satu informan yang memiliki gagasan bahwa kalimat dalam labelisasi dipertegas menjadi “Keluarga Miskin Penerima BANSOS” dengan tujuan membuka

kesadaran sosial upaya penyeleksian penerima BANSOS menjadi lebih tepat sasaran.

Faktor eksternal dalam persepsi masyarakat terlihat dari karakteristik objek yang dipersepsikan, yaitu label yang dipasang pada rumah penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label tersebut mengalami perubahan pada tahun 2024, dari stiker berwarna biru bertuliskan "Keluarga Penerima Manfaat" menjadi stempel berwarna merah bertuliskan "Keluarga Tidak Mampu Penerima Bansos". Perubahan ini tidak hanya terjadi pada bentuk fisik label, tetapi juga pada isi pesan yang disampaikan. Penggunaan istilah "Keluarga Tidak Mampu" memberikan kesan yang lebih tegas dalam menunjukkan kondisi ekonomi penerima bantuan dibandingkan dengan istilah "Keluarga Penerima Manfaat" yang dinilai lebih netral. Perbedaan bentuk, warna, dan pesan komunikasi sehingga memengaruhi cara mereka menilai kebijakan labelisasi. Selain itu, pemasangan label secara permanen di bagian depan rumah menyebabkan status penerima bantuan dapat diketahui oleh semua pihak. Kondisi ini membuat label tidak hanya berfungsi sebagai identitas administrasi, tetapi juga menjadi media komunikasi yang menyampaikan informasi mengenai status penerima bantuan kepada masyarakat luas.

Sementara itu, faktor situasi terlihat dari kondisi sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat setelah kebijakan labelisasi diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan label menciptakan keterbukaan informasi mengenai siapa saja yang menerima bantuan sosial, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui rumah-rumah penerima bantuan. Keterbukaan

informasi tersebut kemudian memunculkan berbagai respons sosial, seperti komentar, penilaian, perbandingan dengan penerima bantuan lainnya, hingga munculnya kecemburuan sosial akibat adanya anggapan bahwa penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Situasi tersebut memengaruhi cara masyarakat memandang kebijakan secara positif maupun negatif. Dengan demikian, persepsi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan karakteristik individu, tetapi juga dibentuk oleh kondisi sosial, fenomena yang terbentuk, interaksi antar masyarakat, serta lingkungan.

Temuan penelitian juga dapat dijelaskan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce melalui konsep tradik *(Triangle of Meaning)* yang terdiri atas tanda *(sign),* objek *(object),* dan interpretan *(interpretant)* (Frelians & Seli, 2025). Berdasarkan penelitian ini, sign diwujudkan melalui stempel berwarna merah bertuliskan "Keluarga Tidak Mampu Penerima Bansos" yang melekat pada rumah penerima BANSOS. Objek dari tanda tersebut merupakan identitas ekonomi keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Sementara itu, interpretant merupakan makna yang muncul dalam pemikiran masyarakat luas setelah melihat tanda tersebut.

Konstruksi makna yang dihasilkan oleh setiap informan menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagian informan memaknai keberadaan label tersebut sebagai bentuk fungsional administratif, yakni sebagai instrumen tata kelola pemerintah untuk efisiensi pendataan, peningkatan transparansi, serta pengawasan ketepatan sasaran bantuan sosial. Sebaliknya, sebagian informan lainnya

mengartikan label tersebut sebagai sebuah simbol kemiskinan yang berdampak pada ketidaknyamanan psikologis dan harga diri. Perbedaan interpretasi ini menegaskan bahwa makna tidak bersifat tidak melekat pada objek, melainkan terkonstruksi secara dinamis melalui pengalaman, pengetahuan, dan konteks sosial penerima. Fenomena ini membuktikan bahwa satu tanda (*sign*) yang sama dapat menghasilkan interpretan (*interpretant*) yang beragam pada tiap-tiap individu.

Temuan penelitian ini juga berkaitan dengan teori stigma sosial yang dikemukakan oleh Erving Goffman yang menjelaskan bahwa stigma terbentuk ketika masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap suatu objek baik individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dianggap berbeda. Dalam konteks penelitian ini, label "Keluarga Tidak Mampu" tidak hanya berfungsi sebagai penanda administratif, melainkan berpotensi menjadi identitas sosial yang memunculkan stigma di lingkungan masyarakat. Sejumlah informan mengungkap pengalaman bahwa setelah rumah mereka diberi label, muncul beberapa respons, seperti komentar, cibiran, bahkan muncul kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa label bukan sekadar penanda administratif, tetapi telah berkembang menjadi identitas sosial yang memengaruhi persepsi dan perlakuan masyarakat terhadap keluarga penerima BANSOS.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan stigma tidak selalu menghasilkan penolakan terhadap kebijakan. Sebagian besar informan tetap menerima eksistensi label karena menganggap bantuan sosial sangat dibutuhkan

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi mampu mengurangi dampak psikologis akibat stigma sosial yang muncul. Di sisi lain, masih terdapat informan yang mengusulkan perubahan redaksi label menjadi lebih netral karena istilah "Keluarga Tidak Mampu" dinilai terlalu menonjolkan kondisi kemiskinan penerima bantuan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead yang menjelaskan bahwa makna suatu simbol terbentuk melalui proses interaksi sosial antar individu. Label yang melekat pada rumah penerima bantuan menjadi simbol komunikasi yang terus diinterpretasikan melalui interaksi masyarakat sehari-hari. Masyarakat tidak hanya melihat label tersebut sebagai tanda penerima bantuan, tetapi juga memberikan berbagai makna berdasarkan pengalaman, serta persepsi yang berkembang melalui interaksi sosial di lingkungan sekitar.

Interaksi simbolik terlihat ketika masyarakat mulai mengidentifikasi masyarakat penerima BANSOS hanya dengan melihat label yang terpasang pada rumah. Keberadaan label tersebut kemudian memunculkan berbagai bentuk komunikasi sosial, seperti komentar, penilaian, dukungan, hingga kritik terhadap ketepatan sasaran bantuan sosial. Bahkan informasi mengenai penerima bantuan sering kali telah menyebar melalui komunikasi interpersonal sebelum diumumkan secara resmi oleh aparat pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa makna label tidak bersifat tetap, melinkan harus terus mengalami pembaharuan, perbaikan, dipahami, dan direkonstruksi kembali melalui interaksi yang berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di samping itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan konsep penerima bantuan sosial (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), yaitu keluarga miskin atau rentan miskin yang memenuhi kriteria pemerintah untuk memperoleh bantuan sosial. Sebagian besar informan memahami bahwa label dipasang sebagai identitas resmi penerima bantuan sosial dan bertujuan memudahkan proses pendataan serta pengawasan. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat persoalan mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa masih terdapat keluarga yang secara ekonomi telah tergolong mampu tetapi masih memperoleh bantuan di tiap periodenya, sementara sebagian masyarakat dari keluarga rentan miskin yang lebih membutuhkan justru belum memperoleh bantuan.

Keberadaan labelisasi belum sepenuhnya menjamin ketepatan sasaran program bantuan sosial. Label hanya berfungsi sebagai penanda administratif, sedangkan keberhasilan program bantuan sosial tetap bergantung pada kualitas pendataan, pemutakhiran data, verifikasi lapangan yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah dan kesadaran diri sebagai penerima bantuan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial tidak cukup diwujudkan melalui pemasangan label, tetapi juga memerlukan sistem pendataan yang akurat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan labelisasi keluarga tidak mampu terbentuk secara terisolasi, melainkan dikonstruksi oleh artikulasi faktor

psikologis, pengalaman empiris individu, dinamika sosial, interaksi antarwarga, serta makna simbolik dari label itu sendiri. Meskipun kebijakan ini terbukti efektif dalam memacu transparansi dan mengoptimalkan identifikasi sasaran bantuan sosial, implementasinya memicu efek samping berupa pemunculan stigma dan pergeseran relasi sosial penerima bantuan. Oleh sebab itu, direkomendasikan agar pemerintah mengadopsi pendekatan komunikasi publik yang lebih inklusif dan humanis serta melakukan pemutakhiran data secara berkala guna menjamin transparansi bantuan tanpa mencederai kondisi psikologis maupun martabat sosial penerimanya

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengetahuan masyarakat** mengenai kebijakan labelisasi tergolong cukup baik. Sebagian besar informan memahami bahwa labelisasi merupakan kebijakan pemerintah yang diterapkan sebagai identitas bagi keluarga penerima bantuan sosial. Informan mengetahui adanya perubahan bentuk label dari stiker berwarna biru bertuliskan "Keluarga Penerima Manfaat" menjadi stempel merah bertuliskan *"*Keluarga Tidak Mampu Penerima Bansos". Masyarakat juga memahami bahwa pemasangan label bersifat wajib sebagai bagian dari mekanisme penyaluran bantuan sosial. Namun, pemahaman masyarakat masih terbatas pada informasi mengenai kewajiban memasang label, sementara tujuan utama dari kebijakan tersebut belum dipahami secara menyeluruh

2. **Tanggapan masyarakat** terhadap kebijakan labelisasi menunjukkan persepsi yang sangat beragam. Sebagian informan memberikan tanggapan positif karena bantuan sosial yang diterima mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga keberadaan label dianggap sebagai konsekuensi yang dapat diterima. Di sisi lain, terdapat informan yang kurang menyetujui penggunaan pesan komunikasi *"*Keluarga Tidak

Mampu*”* karena dianggap memberikan kesan negatif dan kurang menghargai martabat penerima bantuan. Sebaliknya, salah satu infroman memberikan gagasan bahwa penggunakan pesan komunikasi pada label saat ini masih kurang tegas, lebih efektif apabila diganti menjadi “Keluarga Miskin Penerima Bansos”. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya menerima program bantuan sosial, namun masih memiliki keberatan terhadap pesan komunikasi yang digunakan dalam label tersebut.

3. **Sikap masyarakat** terhadap labelisasi cenderung menunjukkan penerimaan terhadap kebijakan meskipun harus menghadapi berbagai penilaian dari lingkungan sekitar. Sebagian informan mengaku menerima komentar, cibiran, maupun kecemburuan sosial akibat adanya label pada rumah mereka. Akan tetapi, mereka tetap mempertahankan sikap menerima karena merasa memang layak dan berhak memperoleh bantuan sosial sesuai kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan rasa malu akibat kebijakan labelisasi.

4. **Manfaat labelisasi** menurut masyarakat lebih banyak dirasakan dalam aspek administratif dibandingkan manfaat langsung bagi penerima bantuan. Label dinilai mempermudah pemerintah dalam mengidentifikasi rumah penerima bantuan, meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menjadi sarana pengawasan sosial terhadap penyaluran

bantuan sosial. Bagi sebagian informan, manfaat yang paling dirasakan tetap berasal dari bantuan sosial yang diterima, sedangkan label hanya dipandang sebagai penanda identitas penerima bantuan.

5. **Ketepatan sasaran** dalam penyaluran bantuan sosial dinilai masih belum optimal. Masyarakat masih menemukan adanya keluarga yang secara ekonomi telah mampu tetapi masih menerima aliran BANSOS, disisi lain masih terdapat keluarga yang lebih membutuhkan justru belum memperoleh bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan labelisasi belum sepenuhnya menjamin program bantuan sosial terlaksana dengan tepat sasaran. Masalah utama terletak pada proses pendataan, verifikasi data, pemutakhiran data penerima BANSOS yang belum dilakukan secara maksimal hingga kurangnya kesadaran masyarakat Penerima BANSOS.

6. **Transparansi data penerima** dinilai telah meningkat melalui penerapan kebijakan labelisasi karena dengan cara ini masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang menerima BANSOS. Penyaaluran BANSOS juga dilakukan secara terang terangan yang diinformasikan melalui pihak Kelurahan, RT/RW dan agen BRILINK. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa informan mengungkapkan bahwa pemerintah belum melakukan verifikasi ulang terhadap kondisi ekonomi penerima bantuan setelah label dipasang. Kondisi ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap akurasi data penerima bantuan sosial dan berdampak pada belum

optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data bantuan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai kebijakan labelisasi dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kondisi ekonomi, interaksi sosial, serta makna yang diberikan masyarakat terhadap label tersebut. Kebijakan labelisasi dinilai mampu meningkatkan transparansi dan mempermudah identifikasi penerima bantuan sosial, tetapi berpotensi memunculkan stigma sosial dan belum sepenuhnya menjamin ketepatan sasaran program bantuan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Konsistensi Dalam Verifikasi Data Penerima BANSOS Secara Berkala

Pemerintah melakukan verifikasi lapangan dan pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap kondisi sosial ekonomi penerima perlu dilakukan secara rutin agar data penerima selalu sesuai dengan kondisi terkini, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih adil, tepat sasaran, serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penetapan penerima manfaat.

5.2.2 Mempertimbangkan Penggunaan Klausa Pada Label

Mempertimbangkan penggunaan pesan komunikasi pada label penerima bantuan sosial yang lebih humanis dan tidak menimbulkan kesan negatif.

Pemilihan redaksi yang lebih netral diharapkan tetap mampu menjalankan fungsi identifikasi dan transparansi tanpa mengurangi martabat, harga diri, serta kenyamanan psikologis masyarakat penerima bantuan sosial.

5.2.3 Meningkatkan Kegiatan Sosialisasi

Sebaiknya pemerintah meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme penerapan kebijakan labelisasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara lebih rinci dan mudah dipahami agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban pemasangan label, tetapi juga memahami bahwa labelisasi merupakan bagian dari upaya dalam peningkatkan keterbukaan data, pengawasan, untuk mencapai tujuan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati dan menghargai penerima bantuan sosial. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memberikan cibiran, stigma, maupun perlakuan diskriminatif terhadap keluarga yang rumahnya diberi label, diharapkan lingkungan sosial menjadi yang lebih inklusif, empatik, juga mendukung pelaksanaan program BANSOS.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Azan, M., Rahuda, & Hasanah, N. (2025). *Persepsi Dan Teori Atribusi Kelley*. *1*, 115–124.

Basit, L., & Pendahuluan, A. (2018). *Fungsi komunikasi*. *1*, 26–42.

Efendi, E., Fadila, F., Tariq, K., Pratama, T., & Azmi, W. (2024). *Interaksionisme Simbolik dan Prakmatis*. *4*(3), 1088–1095. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.514

Fadiah, N. (2025). *Evaluasi Kebijakan Stiker Keluarga Miskin Di Kota Surabaya (Studi Pada Kelurahan Gunung Sari)*. *3*.

Farida, E. N., Negara, A., Ilmu, F., Politik, I., Unej, U. J., & Kalimantan, J. (2024). *DI KABUPATEN BANGKALAN (Public Perception on the Haji Pintar Service in Bangkalan District)*. *I*(1), 21–28.

Faried, A., Yusuf, H., Hukum, F., & Bung, U. (2025). *Penerapan teori teori kriminologi dalam sistem kontrol sosial*. *2*(2), 2709–2715.

Frelians, P. P., & Seli, S. (2025). *Representasi Komunikasi Keluarga dalam Serial ' Saiyo Sakato ': Analisis*. *4*(2), 12719–12727.

Gunawan, I., Dwikotjo, F., Sumantyo, S., & Ali, H. (2023). *Pengaruh Kualitas Produk , Harga dan Suasana Tempat terhadap Kepuasan Konsumen*. *1*(1), 1–17.

Hasan, H., Informasi, S., Vidio, D., & Pendahuluan, I. (2022). *Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri*. *2*(1), 23–29.

Hidayatullah, F. (2022). *Determinan Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal di Indonesia*.

Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). *Peran Kebijakan FiskalDalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. *7*(2), 189–201.

Juniarta, P. P., Wardana, M. A., Wira, K., & Saputra, A. (2022). *Persepsi Wisatawan Milenial Terhadap Akomodasi Glamping di Kawasan Kintamani*. *27*(2), 145–152.

Kholid, A. N. (2025). *Standar Garis Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah*. *10*(02), 491–499. https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2771

Lubis, F. H. (2018). *Analisis Semiotika Billboard Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Medan 2015*. *3*, 17–42.

Millah, A. S., Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). *Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas*. *1*(2), 140–153.

Murajid, A., Hasan, M., Murajid, A., & Hasan, M. (2022). *Analisis Dampak Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Studi Pada Implementasi BLT)*. *3*(2).

Rahma, M., Krisna, A., & Budi, W. (2024). *Stigma terhadap Individu Childfree pada Masyarakat di Kota Denpasar*. *1*(4), 239–253.

Rahmat, A. (2025). *Economics and Digital Business Review Dampak Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Sosial di*. *7*(1), 539–551.

Ramdani, A. (2024). *Dampak belanja subsidi dan bantuan sosial dari apbd terhadap kesenjangan pendapatan di indonesia 1*. *5*, 57–77.

Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). *Metode pengumpulan data melalui wawancara*.

Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). *Penelitian Kualitatif*. *3*, 9680–9694.

Sagita, D. N., Hanim, A., & Diartho, H. C. (2025). *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan terhadap Tingkat kemiskinan Di Indonesia*. *I*(1).

Sianturi, S. F., & Junaidi, A. (2021). *Persepsi Penggemar Pasangan Boys Love (BL Ship) terhadap Homoseksualitas*. *5*(2), 302–311.

Sumarwadji, H., Darwin, D., Ode, L., Iksan, M., & Imran, A. F. (2026). *Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Cukup : Pembangunan Manusia dan Dinamika Kemiskinan di Indonesia*. *5*(3), 1902–1910.

Syaputra, A., & Santoso, P. (2023). *Analisis Semiotika Karikatur Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke 24 Pada Postingan Akun Instagram Jokowi Semiotic Analysis Of Characters Of The 24th Asean High Level Conference On Jokowi ' s Instagram Account Posts*. *2*(3), 183–188.

Tamba, W. P., Felani, M., & Perdhani, Y. (2024). *PANCASILA : Jurnal Keindonesiaan*. *4*(2).

Zanariyah, S. (2024). *Teknik Observasi Yang Efektif Dan Efisien Pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)*. *4*.

LAMPIRAN



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan serah terima surat izin penelitaan dari Sub Bagian Kesra Kelurahan Pardomuan



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Anggi Sukma Dewi



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Yuniati Tanjung



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Siti Hajar



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Rahmadani Damanik



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Ovinaria Hastuti



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Muliati Tanjung



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Rosnah



Dokumentasi Penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Nadia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 23 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

- Nama Lengkap : Azura Husna
  NPM : 2203110312
  Program Studi : Ilmu Komunikasi
  Tabungan sks : 124 sks, IP Kumulatif 3,76

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul Tugas Akhir	Persetujuan
1	Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan terhadap Kebijakan Labelisasi "Keluarga Tidak Mampu" di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar	16 Mei 2026
2	Pengaruh Keputusan Pengunduran Diri Penerima BANSOS atas Kebijakan Pemerintah dalam Labelisasi Rumah Keluarga Tidak Mampu	
3	Analisis Etika Komunikasi pada Labelisasi "Keluarga Tidak Mampu" Terhadap Rumah Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Pardomuan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. *Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

271.22.311

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.
Medan, tgl. 18 Mei 2026

Ketua,

Dr. Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom.
NIDN: 0027048401

Pemohon,

(Azura Husna)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi: .....

(Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh)
NIDN: 0030017402

BAN-PT MQA Agensi Kelayakan Malaysia Malaysian Qualifications Agency QS STARS

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1170/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal **: 18 Mei 2026**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	**: AZURA HUSNA**
N P M	: 2203110312
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah)	: **PERSEPSI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN TERHADAP KEBIJAKAN LABELISASI "KELUARGA TIDAK MAMPU" DI KELURAHAN PARDOMUAN KOTA PEMATANGSIANTAR**
Pembimbing	: **Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 271.22.311 tahun 2026.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 18 November 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 01 Dzulhijjah 1447 H
18 Mei 2025 M

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402

Tembusan :
1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 18 Juni 2026

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Azura Husna
NPM : 2203110312
Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa** (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: ...../SK/II.3-AU/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Terhadap Kebijakan Labelisasi Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK – 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukan ke dalam MAP berwarna **BIRU**;
9. Propsosal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua	Menyetujui	Pemohon,
Program Studi	Pembimbing	
(Dr. Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom)	(Assoc. Prof. Arifin Saleh, M.Si.)	(Azura Husna)
NIDN: 0027048401	NIDN: 0030017402	

BAN-PT MQA Agensi Kelayakan Malaysia Malaysian Qualifications Agency QS STARS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : **1372**/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : **Ilmu Komunikasi**
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : **Dr. AKHYAR ANSHORI., M.I.Kom.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	ALI WARDHANA SILAIMAN DALIMUNTHE	2203110318	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. RIBUT PRIADI., M.I.Kom.	ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONTROVERSI ALUMNI LPDP PADA MEDIA KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID
12	NIA RAMADHANI NAIBAHO	2203110299	CORRY NOVRICA AP SINAGA, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA., M.Si.	POLA KOMUNIKASI ORANG TUA MODEL HERBERT BLUMER DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DI SIDIKALANG
13	LAISYA AZZAHRA	2203110179	ELVITA YENNI, SS., M.Hum.	H. TENERMAN, S.Sos., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI BANK SUMUT KCP PANGKALAN BRANDAN DALAM MENINGKATKAN MINAT NASABAH PADA TABUNGAN SMART IB MAKBUL
14	ANGGUN NIHMA AULIA	2203110061	Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	POLA KOMUNIKASI ORGANISASI PERSIT KARTIKA CHANDRA KIRANA CAB XLIV DIM 0211/ TAPTENG DALAM MEMPERKUAT SOLIDARITAS ANGGOTA
15	AZURA HUSNA	2203110312	Assoc. Prof. Dr. LEYLIA KHAIRANI., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.	PERSEPSI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN TERHADAP KEBIJAKAN LABELISASI "KELUARGA TIDAK MAMPU" DI KELURAHAN PARDOMUAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Medan, 14 Muharram 1448 H
29 Juni 2026 M
Dekan,

(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Azura Husna
N P M : 2203110312
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Terhadap Kebijakan Labelisasi Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18/5/2026	Bimbingan dan ACC judul	
2.	8/6/2026	Bimbingan proposal Bab 1-3	
3.	11/6/2026	ACC Proposal	
4.	18/6/2026	Tanda tangan SK-3 Permohonan Seminar Proposal tugas akhir.	
5.	7/7/2026	Bimbingan draft wawancara.	
6.	8/7/2026	ACC draft wawancara.	
7.	31/7/2026	Bimbingan Hasil Penelitian	
8.	6/8/2026	Bimbingan Bab IV-V dan Abstrak	
9	4/8/26	Lanjut lanjutan Bab IV	
10	5/8/26	Bimbingan perbaikan Simpulan	
11.	7/8/26	ACC cetak Skripsi	

Medan, 07 Agustus 2026

Dekan,

Assc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP
NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

Dr. Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom
NIDN : 0127048401

Pembimbing,

Assc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP
NIDN : 0030017402

Sk-10

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 1902/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Pogram Studi : **Ilmu Komunikasi**
Hari, Tanggal : JUM'AT, 28 AGUSTUS 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
31	FADIYAH KARTIKA AYU	2203110375		Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH. MSP.	ELVITA YENNI, S.S., M.Hum.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, M.I.Kom.	REPRESENTASI PENERIMAAN DIRI DALAM LIRIK LAGU "DIRI" KARYA TULUS DAN "TUTUR BATIN" KARYA YURA YUNITA
32	ANDRIAN DWI PUTRA S	2203110127		Assoc. Prof. Dr. H. YAN HENDRA, M.Si.	ELVITA YENNI, S.S., M.Hum.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI PROKOPIN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DALAM MENGELOLA OPINI MASYARAKAT
33	SILVIANA PUTRI RITONGA	2203110073		Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, M.I.Kom.	Dr. AKHYAR ANSHORI, M.I Kom.	ELVITA YENNI, S.S. M.Hum.	MODEL KOMUNIKASI INTERAKSIONAL GURU DALAM MENINGKATKAN POTENSI DIRI SISWA SMP YAYASAN IRA MEDAN
34	AZURA HUSNA	2203110312		Assoc. Prof. Dr. H. YAN HENDRA, M.Si.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	PERSEPSI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN TERHADAP KEBIJAKAN LABELISASI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KELURAHAN PARDOMUAN KOTA PEMATANGSIANTAR
35	NIA RAMADHANI NAIBAHO	2203110299		Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI. M.I.Kom.	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si.	POLA KOMUNIKASI ORANG TUA MODEL HERBERT BLUMER DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DI SIDIKALANG

Notulis Sidang :
1

Medan, 13 RABIUL AWAL 1448 H
26 AGUSTUS 2026 M

Ditetapkan oleh :
Wakil Rektor Bidang AIK, Pendidikan, Penelitian, dan Digitalisasi

Dr. SAMRAH DOLY NASUTION, S.Pd., M.Si.

Panitia Ujian

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom

BAN-PT STARS

8/1/2026
Acc Pedoman lapangan

DRAFT WAWANCARA

Judul Penelitian : Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Terhadap Kebijakan Labelisasi Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar

Nama Peneliti	: Azura Husna
NPM	: 2203110312
Prodi	: Ilmu Komunikasi
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Hari/Tanggal Wawancara	:
Lokasi Wawancara	:

A. Identitas Informan

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Usia	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Penghasilan	:

B. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama rumah Bapak/Ibu diberi labelisasi sebagai penerima bantuan sosial?
2. Apakah sebelum pemasangan label, Bapak/Ibu diberi penjelasan oleh petugas labelisasi menegenai tujuan pemasangan label?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang label Keluarga Tidak Mampu yang ditempelkan pada rumah penerima BANSOS?
4. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu saat pertama mengetahui bahwa rumah akan diberi label Keluarga Tidak Mampu?
5. Setelah label dipasang, apakah Bapak/Ibu merasa biasa saja, kurang nyaman, malu, atau bahkan merasa terbantu?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah tulisan Keluarga Tidak Mampu pada label tersebut sudah pantas digunakan?

7. Apakah Bapak/Ibu menerima atau menolak adanya pemasangan label tersebut? Mengapa
8. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima komentar, pertanyaan, candaan, atau sindiran dari orang lain terkait label tersebut?
9. Apakah label tersebut memengaruhi hubungan Bapak/Ibu dengan lingkungan sekitar?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan labelisasi ini bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan?
11. Apakah Bapak/Ibu merasakan adanya manfaat dari labelisasi dalam membantu menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial?
12. Berdasarkan pengalaman, apakah dengan kebijakan labelisasi mempermudah Bapak/Ibu dalam menerima bantuan secara rutin?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah labelisasi dapat mengurangi terjadinya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran?
14. Berdasarkan penglihatan Bapak/Ibu, apakah masih ada warga yang sebenarnya layak sebagai penerima tetapi belum menerima bantuan?
15. Apakah ada warga yang menurut Bapak/Ibu sudah mampu tetapi masih menerima bantuan?
16. Apakah informasi meneganai bantuan sosial (BANSOS) dilakukan secara terbuka oleh pemerintah daerah?
17. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemasangan label pada rumah penerima bantuan dapat meningkatkan keterbukaan data penerima bantuan?
18. Menurut Bapak/Ibu, apakah keterbukaan data dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial?

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : **1452**/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : -.-
Hal : ***Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa***

Medan, 23 Muharram 1448 H
08 Juli 2026 M

Kepada Yth **: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Kota Pematang Siantar
di-
Tempat.

Bissmillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, atas nama:

Nama mahasiswa	: **AZURA HUSNA**
N P M	: 2203110312
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: **PERSEPSI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN TERHADAP KEBIJAKAN LABELISASI "KELUARGA TIDAK MAMPU" DI KELURAHAN PARDOMUAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402

Cc : File.

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan H. Adam Malik No. 2 Pematangsiantar, Kode Pos 21117
E-mail kesbangpol.siantar@gmail.com, Website https://kesbangpol.pematangsiantar.go.id

Pematangsiantar, 16 Juli 2026

SURAT IZIN
Nomor : 028/400.14.5.4/487/VII-2026

TENTANG :
Izin Penelitian

Yth. Sdr.Lurah Pardomuan Kecamatan Siantar Timur
Kota Pematangsiantar

di -
TEMPAT

Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penellitian di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1452/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tanggal 08 Juli 2026 Perihal Izin Penelitian Mahasiswa yang kami terima pada tanggal 13 Juli 2026.

Untuk :

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama	:	AZURA HUSNA
NPM	:	2203110312
Jurusan/Prodi	:	Ilmu Komunikasi
Jenjang Studi	:	S1
Pekerjaan	:	Mahasiswa
No HP.	:	0819 5924 7272
Judul Penelitian	:	***"Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Terhadap Kebijakan Labelisasi "Keluarga Tidak Mampu" Di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar"***
Waktu Penelitian	:	14 Juli 2026 s/d 31 Juli 2026
Lokasi Penelitian	:	Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar

Demikian disampaikan untuk keperluan selanjutnya.

KEPALA BADAN

Ir. ALI AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19670923 199303 1 004

Tembusan :
1. Dekan FISIP UMSU MEDAN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR TIMUR
KELURAHAN PARDOMUAN

Jalan Mujahir No. 29 Pematangsiantar 21131

Pematangsiantar, 20 Juli 2026

Nomor :033.6/400.14.5.4/388/VII-2026
Sifat :Biasa
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

di –
MEDAN

Sesuai dengan surat izin penelitian dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1452/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tanggal 08Juli 2026 maka kami dari Kelurahan Pardomuan mengizinkan untuk melakukan penelitian kepada :

Nama	: AZURA HUSNA
NPM	: 2203110312
Jurusan / Prodi	: ILMU KOMUNIKASI
Jenjang Studi	: S1
Pekerjaan	: Mahasiswa
No. Hp	: 0819 5924 7272
Judul Penelitian	: " Persepsi Masyasiswa Penerima Bantuan Terhadap Kebijakan Labelisasi "Keluarga Tidak Mampu" Di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar".

Demikian izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapakn terimakasih.

LURAH PARDOMUAN,

LURAH PARDOMUAN
HENDRI LUBIS, SH
Penata Tk. I
NIP. 196904141994031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SURAT KETERANGAN

No. 1501/KET/KESKAP/VIII/2026

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Azura Husna

Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik.

Judul : Persepsi Masyarakat Penerima Bantuan Terhadap Kebijakan Labelisasi Keluarga Tidak Mampu di Kelurahan Pardomuan Kota Pematangsiantar

Jumlah Halaman : 15 Halaman

Penulis : Azura Husna, Arifin Saleh

sDemikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Agustus 2026

Redaktur Jurnal KESKAP

Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama	: Azura Husna
NPM	: 2203110312
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pematangsiantar 15 April 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Anak ke	: Dua dari Dua Bersaudara
Alamat	: Jl. Jurung Gg Cencen No.12 Kota Pematangsiantar
No. Telepon	: 0819 5924 7272

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Boiman
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Almh. Yusnita
Alamat	: Jl. Jurung Gg Cencen No.12 Kota Pematangsiantar

DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. 2010 - 2016 : SD Negeri 122344 Kota Pematangsiantar
2. 2016 - 2019 : SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar
3. 2019 - 2022 : SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar
4. 2022 - 2026 : Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara